

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Falaakh, Moh. Fajrul. 2007. *Beberapa Pendekatan Studi: Hukum Perundang-undangan, Materi Perkuliahan Hukum Perundang-undangan pada Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: UGM.
- Mahfud, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Prabowo, Gusdan Hanung. 2008. *Beberapa Poin Menuju Legal Drafting di tingkat Desa*. Sukoharjo: Sentosa Utama.
- S, Poerwadarminta, W.J. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, S. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governace*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumartono. 2006. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Syahuri, Moh. Mahfud. 2004. *Hukum Kosntitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widjaja. 2005. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Non Buku

Basri, Seta. 2009. *Trias Politika Pemisahan Kekuasaan*. 15 Januari 2015.

<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/trias-politika-pemisahan-kekuasaan.html>.

Sasrawan, Hedi. 2014. *16 Pengertian Desa Menurut Ahli*. 8 Januari 2015.

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>

Sumber Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-undang Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA
DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN
BERINGIN**

Daftar Pertanyaan :

1. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
2. Bagaimana menurut Anda tentang program Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam membangun sebuah desa?
3. Apakah program Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat khususnya penduduk di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin?
4. Bagaimana BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya?
5. Apakah BPD selalu melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang peranan aspirasi masyarakat desa?
6. Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki BPD sudah memadai?
7. Faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan dan pembuatan Perdes?

8. Faktor Apa saja yang menjadi hambatan saat penyusunan dan pembuatan Perdes?
9. Adakah bentuk lain yang dapat menghambat kinerja BPD di desa?
10. Bagaimanakah langkah yang dilakukan BPD dalam mengatasi hambatan dalam rangka mensosialisasikan Perdes?
11. Dengan cara apa BPD mensosialisasikan Perdes kepada masyarakat?
12. Dengan dilakukannya musyawarah desa dalam penyusunan dan penetapan Perdes, apakah dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat?

